

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Achmad Ali. (2012). *Keterpurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Adami Chazawi. (2015). *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ade Mahmud. (2020). *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*. Bandung: Sinar Grafika.
- Agus Wibowo. (2020). *Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integritas*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Andi Hamzah. (2016). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anonim. (2017). Types of Federal Forfeiture.
- Arsyad, J. H. (2017). *Korupsi dalam Perspektif HAN*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2022). *Hasil Penyelarasan Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Budiman, M. (2020). *Kejahatan Korporasi Di Indonesia*. Malang: Setara Pers.
- _____. (2021). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Chaerudin. (2009). *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Reflika Aditama.
- Chazawi, A. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Penerbit

Raja Gravindo Persada.

Effendi, J. (2015). *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Evi Hartanti. (2012). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ilyas, A. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia.

Jawadi Hafidz Arsyad. (2013). *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kholis, E. L. (2010). *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*. Bandung: Solusi Publishing.

Korupsi, K. P. (2006). *Memahami Untuk Membasmi : Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: KPK.

Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Listianingsih, C. D. R. dan D. M. (2016). *Pendidikan Anti Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Muladi & Barda Nawawi Arief. (1994). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Mulyadi, L. (2010). *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*. Bandung: Mandar Maju.

Purwaning M. Yanuar. (2007). *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. Bandung: Alumni.

- Rahardjo, P. D. S. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rihantoro Bayuaji. (2019). *Prinsip Hukum Perampasan Aset Koruptor Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang*. Surabaya: Laksbang Justisia.
- Salim. (2018). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Simorangkir. (2010). *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soedarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Surabaya: Yayasan Sudarto FH UNDIP.
- Soekanto, S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarsono. (2009). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. (2019). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supriadi, D. (2017). *Ensiklopedia Antikorupsi*. SUrakarta: Borobudur Inspira Nusantara.
- Suyanto. (2018). *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama.
- Wahyudi Hafiludin Sadeli. (2010). *Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Wirjono Prodjodikoro. (2008). *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Reflika Aditama.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Undang-Undang (Uu) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang (Uu) Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Jurnal

Agus Pranoto. (2018). Kajian Yuridis Mengenai Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Legalitas*, X(1).

Darmadi Djufri, Derry Angling Kesuma, dan K. A. (2020). Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 26(2).

Isma Nurillah. (2019). Gatekeeper Dalam Skema Korupsi Dan Praktik Pencucian Uang. *Jurnal Simbur Cahaya*, 2(6).

Jamillah. (2015). Pertanggungjawaban Hukum Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Di Indonesia. *Mercatoria*, 8(2), 166.

Maman Budiman. (2022). Implementasi Prinsip Restorative Justice dalam Penghentian Penuntutan Perkara Korupsi Oleh Kejaksaan Republik Indonesia. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(3), 1048.

Trisna, W., & Mubarak, R. (2017). Kedudukan Korban dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 7(2), 117–126. <https://doi.org/10.31289/JAP.V7I2.1333>

D. Internet

Anonim. (2017). Types of Federal Forfeiture.

Anonim. (2018). How Crime Pays: The Unconstitutionality of Modern Civil Asset Forfeiture as a Tool of Criminal Law Enforcement. Retrieved June 14, 2024, from <https://harvardlawreview.org/2018/06/how-crime-pays-the-unconstitutionality-of-modern-civil-assetforfeitureas-a-tool-of-criminal-law-enforcement/>

BPHN. (2023). Aset Tindak Pidana yang di Rampas. Retrieved June 14, 2024, from <https://partisipasiku.bphn.go.id/diskusi/aset-tindak-pidana-yang-di-rampas>

Diamanty, I. K. dan. (2023). Johnny G Plate Divonis 15 Tahun Penjara Dalam Kasus Korupsi Menara BTS 4G Kominfo. Retrieved June 14, 2024, from <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/08/15432841/johnny-g-plate-divonis-15-tahun-penjara-di-kasus-bts-4g-kominfo>

umilang, Y. H. (2023). KSP: RUU Perampasan Aset “Game Changer” Pemberantasan Korupsi. Retrieved June 14, 2024, from

<https://www.ksp.go.id/ksp-ruu-perampasan-aset-game-changer-pemberantasan-korupsi.html>

Meiliani. (2020). Kasus Korupsi TPPI Rp37 T, Honggo Dituntut 18 Tahun Bui. Retrieved June 14, 2024, from <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/08/15432841/johnny-g-plate-divonis-15-tahun-penjara-di-kasus-bts-4g-kominfo>

Nasional, B. P. H. (2023). Perampasan Aset terkait Tindak Pidana. Retrieved June 15, 2024, from <https://partisipasiku.bphn.go.id/kategori/perampasan-aset-terkait-tindak-pidana>

Partisipasiku Admin. (2023). Kumpulan Definisi dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana. Retrieved June 15, 2024, from <https://partisipasiku.bphn.go.id/diskusi/kumpulan-definisi-dalam-ruu-perampasan-aset-tindak-pidana>